

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam pelaksanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan pelaku-pelaku pembangunan baik dari pemerintah maupun masyarakat terutama bagi aparatur pemerintah. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan Sumber Daya Manusia aparatur Negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata serta penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penyelenggaraan pemerintahan di era reformasi sekarang ini perlu peningkatan prestasi kerja aparatur pemerintahan secara terarah dan terencana terus menerus melalui pembinaan secara kontinyu. Oleh karena itu, dalam meningkatkan prestasi kerja pegawai, perlu dilaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap aparatur sipil negara untuk meningkatkan kualitas baik dalam bidang manajemen maupun tugas pokok sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang perlu diaplikasikan dengan sebaik-baiknya agar daya guna dan hasil guna setiap aparatur terwujud.

Jelaslah bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dewasa ini bagi aparatur pemerintah, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka salah

satu upaya yang perlu dilakukan adalah mengikuti program pendidikan dan latihan (diklat) yang biasanya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah serta pihak-pihak yang berkompeten. Hal ini dilaksanakan mengingat tugas dan fungsi aparatur pemerintah yang diemban sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, meliputi tugas pemerintahan, pelayanan masyarakat, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sehingga mereka perlu terus didayagunakan untuk mendorong produktifitas kerja aparatur itu sendiri sesuai dengan yang diharapkan.

Pentingnya meningkatkan produktifitas kerja aparatur pemerintah melalui pendidikan dan latihan, mengingat masa depan pembangunan adalah terletak pada aparatur pemerintah itu sendiri. Fungsi pemerintah dalam hal ini adalah merencanakan, mengerjakan, mengendalikan/mengevaluasi kegiatan pembangunan serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kualitas pelaksanaan fungsi ini sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan, wawasan dan keterampilan aparat, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh para ahli, bahwa sumberdaya utama suatu organisasi bukan teknologi atau barang modal, tetapi manusia. Ini berarti hanya dukungan sumberdaya manusia (aparatur) yang memadai baik dalam bentuk, jenis jumlah dan kualitas yang dapat membantu mewujudkan tujuan organisasi (Organisasi Pemerintahan)

Disadari pula bahwa keberhasilan suatu organisasi tergantung pada kemampuan sumber daya manusiannya yang mampu mengimplementasikan tugas-tugas sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat serta ditopang

oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dewasa ini. Oleh karena itu Aparatur Sipil Negara sebagai abdi negara dan masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan profesionalismenya untuk dapat menjawab tuntutan pekerjaan yang semakin menantang.

Diharapkan skenario peningkatan pengembangan sumber daya manusia melalui fungsi kinerja pegawai akan lebih mencerminkan upaya ke arah profesionalisme yang selanjutnya memberi kontribusi pada penyelesaian tugas-tugas secara rutin dan dalam lingkup kegiatannya dengan memuaskan dan lebih efektif dan efisien untuk mencapai sasaran organisasi. Makna yang lebih penting dipahami dalam melihat keterkaitan ataupun pengembangan sumber daya manusia terhadap peningkatan prestasi kerja dalam pelaksanaan tugas-tugas rutin di lingkungan kerja tertentu adalah meningkatnya kinerja pegawai yang lebih berkualitas.

Sumber daya manusia menjadi sangat penting untuk menghindari atau mencegah terjadinya pekerjaan yang tidak efektif dan efisien dalam penyalahgunaan wewenang, penyelewengan serta kekeliruan dalam bekerja, sehingga memungkinkan pimpinan melakukan tindakan perbaikan sedini mungkin. Peningkatan prestasi kerja pegawai di lingkungan aparatur/pemerintah bertolak dari motivasi untuk meningkatkan kerja aparatur agar tercipta efisiensi dan efektifitas serta dapat menghindari penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, di lingkungan organisasi unit kerja masing-masing.

Berdasarkan observasi awal peneliti masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh aparatur di lingkungan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Poso dalam melaksanakan tugas-tugasnya antara lain :

1. Masih adanya aparatur yang kurang mampu menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan tepat pada waktunya. Contoh : hal ini terlihat dari aparatur di bagian umum dan kepegawaian dalam pembuatan laporan sering terlambat dan tidak tepat waktu, yang seharusnya pembuatan laporan selesai dalam waktu satu minggu.
2. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam memahami pengoperasian komputer. Contoh : pada bagian umum dan keuangan, masih ada aparatur yang kurang terampil dalam menggunakan fasilitas komputer yang tersedia, dalam penyelesaian pembuatan surat-surat atau laporan, sehingga surat-surat atau laporan-laporan tersebut sering terlambat dalam penyelesaiannya dan hasil pekerjaannya kurang maksimal.

Masalah tersebut diatas, peneliti menduga disebabkan oleh salah satunya karena faktor pengembangan sumber daya manusia yang belum dijalankan dengan tepat. Hal ini terlihat dari :

1. Tidak adanya pendayagunaan dalam menciptakan suasana/iklim yang baik antara atasan dan bawahan didalam lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Poso, agar para aparatur itu merasa nyaman dan termotivasi dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawabnya, tanpa ada rasa

tekanan dari manapun sehingga pelaksanaan pekerjaan akan tercapai sesuai dengan waktu yang ditentukan.

2. Pimpinan dalam hal ini sekretaris DPRD kurang memperkuat potensi/daya yang dimiliki oleh masing-masing aparatur, khususnya dalam peningkatan taraf pendidikan, akses sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti teknologi dan informasi, sehingga aparatur di Sekretariat DPRD Kabupaten Poso tersebut kurang memiliki pengetahuan dan keahlian didalam memanfaatkan fasilitas kantor yang telah tersedia, sehingga dalam pelaksanaan akan pekerjaannya tidak maksimal.

Perlunya peningkatan kualitas aparatur sipil negara tercantum dalam penjelasan umum, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara pada pasal 12 menyebutkan bahwa pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari Intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme”. Oleh karenanya dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan nasional yang madani serta taat hukum, ber peradaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan aparatur sipil yang merupakan unsur Aparatur Negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat yang dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945.

Sekretariat DPRD Kabupaten Poso memiliki fungsi strategis dalam upaya pengembangan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi, terlebih dahulu harus berorientasi pada pengembangan aparatur yang dimilikinya sehingga pengembangan sumber daya manusia harus dianggap sebagai aspek yang paling strategis dalam organisasi. Oleh sebab itu fokus pada pendidikan aparatur itu adalah meningkatkan kemampuan individualnya. Sedangkan pelatihan merupakan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan program teknis fungsional aparatur yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Poso”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dalam kajian ini yang menjadi masalah adalah :

1. Bagaimana pengembangan sumber daya manusia untuk prestasi kerja aparatur sipil negara pada Sekretariat DPRD Kabupaten Poso?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia untuk prestasi kerja aparatur sipil negara pada Sekretariat DPRD Kabupaten Poso?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Untuk mengetahui pengembangansumber daya manusia untuk prestasi kerja aparatur sipil negara pada Sekretariat DPRD Kabupaten Poso.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia untuk prestasi kerja aparatur sipil negara pada Sekretariat DPRD Kabupaten Poso.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya dunia akademisi Ilmu Administrasi.
- b. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran tentang permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencari solusi guna optimalisasi prestasi kerja pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Poso.